

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seseorang, karena pendidikan menjadi jembatan untuk memperbaiki kehidupan individu menjadi lebih baik. Nasution (2010, hlm. 10) menjelaskan mengenai aspek pendidikan dan pengertian pendidikan:

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan perilaku anak didik. Pendidikan berhubungan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola perilaku manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Pendidikan sendiri akan diperoleh seseorang melalui berbagai tempat seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Dikenal adanya tiga bentuk pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal diperoleh individu melalui lembaga sekolah, pendidikan informal diperoleh melalui keluarga sedangkan pendidikan non formal diperoleh melalui masyarakat.

Berdasarkan landasan filosofis dalam Kurikulum 2013 disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik sehingga mampu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Fitri Nur Millah , 2014

*ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR*

*SEMBILAN TAHUN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal masih menjadi syarat penting untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak menjamin kemampuan seseorang dalam pekerjaannya. Nasution (2010, hlm. 14-17) menyebutkan mengenai fungsi sekolah bagi individu, yakni:

- a. Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan
- b. Sekolah memberikan keterampilan dasar
- c. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib
- d. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan
- e. Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial
- f. Sekolah mentransmisi kebudayaan
- g. Sekolah membentuk manusia yang sosial
- h. Sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan
- i. Fungsi-fungsi sekolah lainnya

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pendidikan formal menjadi jembatan bagi individu untuk memperbaiki nasibnya sehingga status sosialnya di dalam masyarakat tentunya akan menjadi lebih tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pendidikan adalah sebagai sebuah jalan bagi individu untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hal ini berkenaan dengan adanya mobilitas sosial yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan pendidikan yang telah dijalankan seseorang dalam lembaga pendidikan formal yakni sekolah. Mobilitas sosial dapat berupa peningkatan atau penurunan dari segi status dan peranan seseorang atau sekelompok orang yang biasanya dilihat dari segi penghasilan yang diperolehnya (Setiadi dan Kolip, 2010, hlm. 503). Melalui sekolah maka individu akan memperoleh keterampilan dasar yang tentunya adalah sebagai bekal untuk mencari pekerjaan.

No. 2078/JN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Sehingga dengan hal tersebutlah individu mampu melakukan mobilitas sosial.

Pendidikan sebagai salah satu pilar penting masa depan menjadikan hal tersebut wajib didapatkan oleh setiap individu. Mengingat sangat pentingnya pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan agar seluruh warga dapat memperoleh pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 dan 5 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menentukan tentang hak dan kewajiban warga negara:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Bagian hak dan kewajiban warga negara tersebut menyiratkan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, namun pada kenyataannya dalam memperoleh pendidikan seringkali terkendala oleh faktor ekonomi. Sehingga tujuan pendidikan yang menyeluruh tidak mampu terlaksana dengan baik karena masih terdapat warga yang kurang mampu untuk membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dan praktisi pendidikan sehingga melahirkan program wajib belajar enam tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 kemudian diperbaharui menjadi sembilan tahun sejak tahun 1994

Pendidikan wajib belajar sembilan tahun merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia serta sebagai salah satu upaya untuk menekan angka anak putus sekolah. Mengenai wajib belajar telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 34 tentang Sisdiknas, yakni:

No. 2073/UN.40.2.8/PE/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dicanangkannya Pendidikan Wajib Belajar sembilan tahun sejak 1994 menjadi salah satu pijakan awal peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, dengan harapan akan semakin berkurang anak-anak yang putus sekolah dengan alasan ekonomi. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Maksud utama dari dicanangkannya wajib belajar adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar sampai dengan usia 15 tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik dijenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja dengan kesempatan yang terbuka untuk seluruh warga negara.

Jika melihat sudah adanya pendidikan wajib belajar sembilan tahun ini tentu tidak ada alasan bagi anak untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP karena adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang membebaskan siswa dari iuran bulanan ke sekolah. Namun ternyata masalahnya tidak sesederhana itu, pelaksanaan pendidikan wajib belajar dan BOS yang diberikan tidak sepenuhnya membebaskan

**No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014**

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

biaya sekolah bagi anak. Masih adanya biaya-biaya lain yang tetap harus dibayar oleh orang tua siswa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah seperti seragam sekolah, alat tulis, dan lain sebagainya. Tujuan adanya pemberian BOS ini sesuai dengan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yaitu:

Menyediakan subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan di SD/SMP/pendidikan yang sederajat tanpa terkendala oleh permasalahan ekonomi, geografi, sosial-budaya, daya tampung dan lain-lain.

Wahyuningsih dan Ma'rifah (2011, hlm. 204) menyebutkan bahwa masyarakat berfikir yang bisa menjadikan mereka kaya itu bukan pendidikan, tetapi karena kerja keras dan keuletan mereka bekerja. Adanya pandangan demikian menyiratkan bahwa pendidikan di kaum ekonomi lemah tidak akan mengalami peningkatan dan ini akan mengakibatkan rendahnya kualitas SDM dan juga berakibat pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun pada kenyataannya tidak hanya terkait masalah mikro pendidikan seperti ruang kelas yang buruk, jumlah tenaga pendidik yang kurang, buku mahal dan sebagainya. Namun permasalahan makro yang menyangkut ekonomi atau kemiskinan, keamanan, sosial dan budaya juga turut menyumbangkan peranan dalam pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun itu sendiri.

Melihat permasalahan makro yang telah disebutkan, faktor sosial dan budaya menjadi faktor penting yang dapat banyak mempengaruhi upaya penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Istilah sosial sangat erat kaitannya dengan masyarakat,

**No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014**

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

karena pada dasarnya manusia membutuhkan satu sama lain dan menghasilkan masyarakat. Sedangkan Koentjaraningrat (1990, hlm. 180) mengartikan budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selain itu Koentjaraningrat (1990, hlm. 203-204) juga menyebutkan bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yaitu;

- 1) Bahasa
- 2) Kesenian
- 3) Sistem religi
- 4) Sistem teknologi
- 5) Sistem mata pencaharian
- 6) Organisasi sosial
- 7) Sistem ilmu pengetahuan

Realitas sosiokultural atau sosial budaya menurut Setiadi dan Kolip (2010, hlm.31) merupakan kenyataan-kenyataan atau keadaan sosial budaya yang menempati daerah atau lingkungan sekitar kehidupan masyarakat. Sehingga faktor sosial budaya yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun adalah segala keadaan yang dapat terlihat dan sering terjadi di kehidupan masyarakat tersebut.

Kondisi pendidikan di suatu wilayah akan banyak dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Setiadi dan Kolip (2010, hlm. 44) menyebutkan bahwa struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur-unsur yang dimaksud saling berhubungan sehingga apabila terjadi suatu perubahan dari salah satu unsur, maka unsur yang lain akan mengalami perubahan juga. Begitu pun halnya dengan unsur pendidikan, dimana apabila dalam struktur sosial masyarakat terdapat salah satu

No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

unsur yang berubah maka akan mempengaruhi kepada unsur pendidikan dan juga sebaliknya.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdalisbang) Jawa Barat masih berada di tingkat tiga terbawah diatas Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. IPM Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 sebesar 69,55. Angka IPM tersebut dipengaruhi pula oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah pendidikan.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur sendiri masih tergolong rendah, hal tersebut terlihat dari fakta yang ada bahwa masih banyak sekolah dan ruang kelas dalam keadaan rusak dan kurang layak, mutu lulusan yang belum memenuhi keinginan masyarakat, dan pelayanan pendidikan yang masih kurang. Selain itu jumlah tenaga pendidik yang masih kurang, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata serta kualitas (kualifikasi dan relevansi) dari tenaga pendidik yang masih belum memadai. Sehingga proses belajar mengajar belum sepenuhnya didukung oleh tenaga yang memadai dan juga sarana prasarana yang memadai pula. Berbagai persoalan yang dialami oleh Kabupaten Cianjur dalam hal pendidikan tentu menjadikan cerminan bahwa perlu adanya upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi masalah pendidikan yang kelak akan ditemui.

Masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur ini mempengaruhi partisipasi sekolah masyarakatnya. Bilamana aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan yang ada kurang mendukung, maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi partisipasi sekolah. Pada tabel 1.1 ini tergambar angka partisipasi sekolah Kabupaten Cianjur.

No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Berusia 7-12 dan 13 – 15 tahun Menurut Partisipasi Sekolah Di Kabupaten Cianjur Tahun 2011

<b>Partisipasi Sekolah</b>	<b>Usia 7 – 12 tahun</b>	<b>Usia 13 – 15 tahun</b>
Tidak/ Belum Sekolah	2,40	0,00
Masih Sekolah	96,97	81,79
Tidak Sekolah Lagi	0,63	18,21
Jumlah	100,00	100,00

*Sumber: BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2011*

Penduduk berusia 7 – 12 tahun dapat digolongkan kepada Anak Usia Sekolah Dasar (SD), sedangkan penduduk berusia 13 – 15 tahun dapat digolongkan kepada anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan tabel partisipasi sekolah diatas tergambar bahwa masih banyak anak usia SMP yang tidak bersekolah lagi.

Partisipasi sekolah masyarakat menggambarkan kesadaran pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi sekolah ini juga berhubungan erat dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah tersebut.

Kecamatan Cibeber merupakan satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Cianjur yang akan dijadikan lokasi penelitian. Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sendiri dapat dikategorikan belum efektif karena adanya beberapa titik desa di kecamatan tersebut yang masyarakatnya tidak menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang SMP.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kondisi masyarakat wilayah tersebut yang belum sepenuhnya mampu berpartisipasi dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Kecamatan Cibeber ini memiliki wilayah yang cukup luas sampai ke wilayah pegunungan, hal ini yang menjadi salah satu faktor tidak berjalannya program wajib belajar 9 tahun karena kurangnya sekolah yang mampu menampung anak-anak dari daerah pegunungan yang terpencil.

No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Walaupun wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan nyatanya masih banyak anak usia sekolah di kecamatan tersebut yang tidak melanjutkan ke SMP. Adapun APK dan APM Kecamatan Cibeber untuk tingkat SMP pada tahun 2012 akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 APK dan APM SMP/MTs Kecamatan Cibeber tahun 2012

<b>Kecamatan</b>	<b>APK</b>	<b>APM</b>
Cibeber	66.86	58.83

*Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kab.Cianjur tahun 2012*

Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah sebesar 130,96 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 18 desa. Dengan wilayah yang luas tersebut, kecamatan Cibeber masih memiliki wilayah yang tergolong ke dalam wilayah tertinggal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik sebanyak sepertiga dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Cibeber masih termasuk desa tertinggal, yaitu desa Cibokor, Kanoman, Girimulya, Salagedang, Cimanggu dan Sukaraharja. Selain ke enam desa tertinggal tersebut terdapat desa lain yang sebagian wilayahnya masih tergolong tertinggal namun tidak digolongkan ke dalam desa tertinggal.

Jumlah sekolah yang ada di desa terpencil tersebut juga tergolong sedikit, mengingat wilayah desa tersebut yang luas sehingga tidak mampu menyentuh wilayah kampung-kampung pelosok. Sekolah dasar yang ada di wilayah terpencil mencakup lebih dari empat kampung, dan dari beberapa kampung tersebut jarak yang harus ditempuh untuk ke SD lumayan jauh. Ada yang harus menempuh 1 sampai 3 jam perjalanan dengan jalan kaki untuk sampai ke sekolah. Data mengenai jumlah sekolah akan dipaparkan dalam tabel berikut.

**No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014**

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.3 Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Desa Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur 2012

No	Desa	SD		SMP	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Cibokor	7	-	1	-
2	Kanoman	5	-	-	1
3	Cipetir	3	-	-	-
4	Cikondang	4	-	-	1
5	Cihaur	5	-	1	1
6	Sukamanah	4	-	-	-
7	Salagedang	5	-	-	-
8	Cibadak	4	-	-	-
9	Girimulya	2	-	-	-
10	Cimanggu	3	-	-	-
11	Cisalak	4	-	1	-
12	Mayak	4	-	-	-
13	Peuteuycondong	5	-	-	-
14	Sukaraharja	3	-	-	-
15	Sukamaju	4	-	1	-
16	Cibaregbeg	3	-	-	-
17	Karangnunggal	4	-	1	-
18	Salamnunggal	3	-	-	-
	Jumlah	73	-	5	3

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur: Kecamatan Cibeber dalam Angka 2012

Keberadaan sekolah yang dekat dengan daerah terpencil sangat terbatas sehingga memang banyak anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena jarak sekolah yang cukup jauh. Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan Cibeber masih terpusat di desa yang secara geografis dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan. Sehingga beberapa desa yang tergolong jauh memang mengalami kesulitan dalam sarana transportasi untuk menuju sekolah. Selain karena memang masih kurangnya angkutan umum yang mencapai desa-desa tersebut, juga karena kondisi masyarakat

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang belum mampu untuk menyekolahkan anaknya dikarenakan jarak yang jauh juga tidak adanya biaya untuk kebutuhan transportasi menuju sekolah.

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri dalam mengupayakan penuntasan wajib belajar ini diantaranya adalah dengan Cerdas Atap. Program cerdas atap yakni melaksanakan pembelajaran untuk siswa SMP di wilayah yang terpencil dan secara geografis jauh dari SMP. Pembelajaran siswa SMP cerdas atap ini dilakukan setelah pembelajaran para siswa SD, karena menggunakan gedung SD. Untuk tenaga pendidik yang mengajar siswa SMP pada program tersebut pun adalah para guru SD yang sebelumnya dibimbing terlebih dahulu sehingga memenuhi kualifikasi untuk mengajar siswa SMP. Selain itu juga adanya SMP terbuka di berbagai wilayah menjadi salah satu upaya terlaksananya wajib belajar 9 tahun khususnya bagi wilayah yang terpencil.

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kecamatan Cibeber ini turut dipengaruhi oleh kondisi sosial dan faktor budaya yang ada serta melekat dalam diri masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya kondisi sosial yang ada di masyarakat seperti halnya kondisi ekonomi, mobilitas sosial serta pelapisan sosial yang mengakibatkan kesenjangan sosial akan memberikan pengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Selain daripada kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat kecamatan Cibeber sendiri tentunya tidak akan terlepas dari faktor budaya yang melekat di dalam masyarakat sebagai salah satu faktor yang akan memberikan kontribusi pula terhadap partisipasi pendidikan masyarakatnya. Unsur budaya yang sudah melekat dalam diri masyarakat tentunya akan terus hidup dan sulit untuk merubah sehingga unsur-unsur budaya tersebut dapat menghambat untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat.

No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP sebanyak kurang lebih 20% yang memilih untuk menjadi santri di pondok pesantren dan yang lainnya bekerja sebagai buruh tani membantu orang tua, pergi ke kota sebagai buruh pabrik, menjadi TKI dan tidak jarang pula bagi anak gadis yang tidak melanjutkan, mereka akan dinikahkan dengan pemuda yang sudah bekerja agar kehidupan sang anak terjamin walaupun tidak melanjutkan sekolah. Hal demikianlah yang menjadikan banyak anak perempuan di Kecamatan Cibeber tidak melanjutkan sekolah, selain memang faktor utamanya adalah ekonomi namun faktor budaya juga menjadi salah satu pendorongnya. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan formal bukan satu hal yang penting bagi anak mereka. Para orang tua lebih memilih memasukkan anak mereka ke pesantren untuk menuntut ilmu agama lebih dalam daripada menyekolahkan mereka di lembaga pendidikan sekolah. Hal ini karena para orang tua beranggapan pendidikan pesantren lebih penting dan tentunya lebih ekonomis secara materi.

Bentuk pembinaan anak usia sekolah yang ada di Kecamatan Cibeber secara sepintas dapat dikatakan belum maksimal, karena melihat masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah walaupun secara biaya dibebaskan. Pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun yang menjadi program pemerintah pun masih belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

Berkenaan dengan banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Cibeber serta mengungkapkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi tidak efektifnya program wajib belajar tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

: “Analisis Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas tergambar bahwa yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Proses pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur yang menyangkut penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ataupun bantuan-bantuan yang lainnya, animo masyarakat terhadap sekolah gratis melalui wajar dikdas, proses pembelajaran di sekolah, distribusi tenaga pendidik dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan wajar dikdas tersebut.
2. Peranan tokoh masyarakat difokuskan kepada pengawasan dan dukungan dari tokoh masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun.
3. Faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menyangkut interaksi sosial, mobilitas sosial dan stratifikasi sosial masyarakat Kecamatan Cibeber serta kondisi geografis wilayah tersebut.
4. Faktor Budaya yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang menyangkut nilai-nilai religi, mata pencaharian, organisasi sosial dan sistem ilmu pengetahuan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Cibeber.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok yaitu “Bagaimanakah pengaruh sosial budaya terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kecamatan Cibeber” Agar rumusan masalah

No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut menjadi rinci, maka dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimanakah peranan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur?
3. Faktor-faktor sosial apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur?
4. Faktor-faktor budaya apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Secara umum

Tujuan secara umum dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor sosial budaya yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di kecamatan Cibeber. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan faktor sosial dan budaya apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga dengan tergambarkannya faktor-faktor tersebut dapat menjadikan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun menjadi lebih baik.

2. Secara Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
- b. Mengetahui peranan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Mengetahui faktor sosial apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
- d. Mengetahui faktor budaya apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat secara teoretis bagi disiplin ilmu sosiologi dari penelitian yang dilakukan ini membantu memecahkan masalah putus sekolah dengan menggunakan teori-teori yang ada di sosiologi, diantaranya dengan memperkuat aspek pendidikan dan lingkungan sosial serta pendidikan dan kebudayaan yang merupakan kajian dari Sosiologi Pendidikan. Sebagai salah satu referensi bagi sosiologi pendidikan untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan serta meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

###### a. Peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam bidang sosiologi pendidikan.
- 2) Untuk menambah wawasan luas mengenai kondisi riil di masyarakat.
- 3) Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian di bidang pendidikan.

###### b. Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang penting sebagai bekal individu menjejaki masa depan.

###### c. Dinas Pendidikan

**No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014**

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

- 1) Membantu pemerintah dalam mencari cara untuk mencegah terjadinya putus sekolah dan mensukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- 2) Mengungkapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan wajib belajar yang lebih baik.

d. Pendidik

Memberikan informasi bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun masih tidak berjalan secara merata dan diharapkan pendidik mampu menyumbangkan sumbangsih bagi lancarnya pendidikan di Indonesia.

#### **F. Struktur Organisasi Skripsi**

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka skripsi ini disajikan dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Struktur Organisasi Skripsi

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

- A. Konsep Sosial
  1. Interaksi Sosial
  2. Mobilitas Sosial
  3. Stratifikasi Sosial
- B. Konsep Budaya

<b>No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014</b>
-----------------------------------

Fitri Nur Millah , 2014

**ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**SEMBILAN TAHUN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- C. Penelitian Terdahulu
- D. Kerangka Pemikiran

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Lokasi dan Sampel Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Umum
- B. Deskripsi Hasil Penelitian
- C. Pembahasan

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

**No. 2073/UN.40.2.8/PL/2014**

Fitri Nur Millah , 2014

*ANALISIS SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR*

*SEMBILAN TAHUN*